

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anwar, Saiful. 2004. *Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Glora Madani Press.
- Amran Suadi, 2014, *Sistem Pengawasan Badan Peradilan di Indonesia*, Rajagrafindo Persada, Depok
- C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil. 2001. *Pemerintahan Daerah Di Indonesia (Hukum Administrasi Daerah)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Dr. Muhaimin, SH., M.Hum. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University.
- H.Bohari, 1992,*Pengawasan Keuangan Negara*, Jakarta: Penerbit CV Rajawali.
- Jazim Hamidi & Mustafa Lufti, 2011, *Dekontruksi Hukum Pengawasan Pemerintah Daerah*, UB Press, Malang.
- M. Kadarisman. 2013. *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Raja Grafindo Persada. Depok.
- Nurmayani. 2000. *Hukum Administrasi Negara (Buku Ajar)*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Pasolong, Harbani. 2013. *Teori Administrasi Publik*. Yogyakarta: Alfa Beta.
- Prof. Dr. Irwansyah, SH., MH. 2020. *Penelitian Hukum*. Revisi. ed. MH Ahsan Yunus, SH. Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- Ridwan HR, 2017, *Hukum Administrasi Negara*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Safi'i. 2008. *Paradigma Baru Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah*. Malang: Averroes Press.
- Saidi, Muhammad Djafar. 2011. *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Situmorang, Victor M., and Jusuf Juhir. 1994. *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sunggono, Bambang. 2003. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sururama, Rahmawati and Rizki Amalia. 2020. *Pengawasan*

Pemerintahan. Bandung: Cendekia Press.

Sutedi, Adrian. 2010. *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.

W. Gulo. 2010. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT. Grasindo.

Widjaja, HAW. 2003. *Otonomi Daerah Dan Daerah Otonom*. PT Raja Grafindo Persada.

Zainuddin. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal

Agusti, Restu. 2012. "Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah Dengan Dimoderasi Oleh Variabel Desentralisasi Dan Budaya Organisasi (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Bengkalis)." *Jurnal Ekonomi* 20(3): 1–15.

Raharja, Mega, Ratih Nur Pratiwi, and Abdul Wachid. 2017. "Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (Studi Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah , Kabupaten Lamongan)." *Jurnal Administrasi Publik (JAP), Universitas Brawijaya, Malang* 3(1): 111–17.

Maulidiah, Sri. 2017. "Optimalisasi Pengelolaan Aset Sebagai Wujud Reformasi Birokrasi Di Daerah." *Jurnal Pemerintahan, Politik dan Birokrasi* 3(1): 233–42.

Fauzi, Achmad. 2019. "Otonomi Daerah Dalam Kerangka Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Baik." *Spektrum Hukum* 16(1): 119.

Erlis Milta Rin Sondole dkk. 2015. "Pengaruh Disiplin Kerja, Motivasi Dan Pengawasan Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. Pertamina (Persero) Unit Pemasaran VII Pertamina BBM Bitung." *Jurnal EMBA* 3.

Arifuddin Hamid. 2009. "Revitalisasi Lembaga Pengawas Internal Pemerintah (Peran Dan Kedudukan BPKP Dalam Sistem Pengawasan Keuangan Negara)." (september): 1–11.

Aras Aira. Peran Manajemen Aset Dalam Pembangunan Daerah. *Jurnal Penelitian Social Keagamaan*, Vol.17 Januari-Juni 2014

Peran Pengawasan Intern Mengamankan Aset Daerah. *Warta Pengawasan* Vol Xxii/ Nomor 8/2015

Skripsi

Hardini Wulandari, 2017, "*Peran Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Dalam Mengawasi Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Kantor Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Provinsi Sumatera Utara)*". Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Nur Rezki Amalia Aliyas, 2020, "*Tinjauan Yuridis Audit Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Dalam Penentuan Kerugian Keuangan Negara (Studi Kasus Ketua DPRD Kabupaten Enrekang Tahun 2019)*". Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Peraturan Perundang-undangan

"Peraturan Kepala BPKP Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perwakilan BPKP."

"Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2014 Tentang Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP)."

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Peraturan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis BPKP Tahun 2020-2024.

Rencana Strategis BPKP Perwakilan Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2020-2024

Surat Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Nomor S-666/D3/01/2022 Tentang Pedoman Petunjuk Teknis Pengawasan Aset Strategis Daerah

Web Online

"BPK RI." <https://www.bpk.go.id/news/bpk-tak-sudi-dianggap-cari-kesalahan>

Dosen Pendidikan. "Pengawasan Adalah." <https://www.dosenpendidikan.co.id/pengawasan-adalah/>

Fadhila, Syamsi Nur. 2022. "BPK Beri 24 Catatan Untuk LKPD Pemerintah

Kota Makassar.”
<https://makassar.sindonews.com/read/774839/711/bpk-beri-24-catatan-untuk-lkpd-pemerintah-kota-makassar-1653041107>

Firzada, Mohammad Iqbal. 2021. “Perspektif Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) Sebagai Modal Awal Pembangunan Nasional.” *Kementrian Keuangan RI*. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-biak/baca-artikel/14179/Perspektif-Pengelolaan-Barang-Milik-Daerah-BMD-Sebagai-Modal-Awal-Pembangunan-Nasional.html>

Nafkar, Rizal. 2021. “16 Temuan BPK Atas Laporan Keuangan Pemkot Makassar 2020, Bikin Kerugian Negara - Makassarinsight.Com.” <https://makassarinsight.com/read/16-temuan-bpk-atas-laporan-keuangan-pemkot-makassar-2020-bikin-kerugian-negara>

“Situs Resmi BPKP-RI.” <https://www.bpkp.go.id/konten/11/Kegiatan.bpkp>